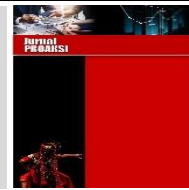




JURNAL PROAKSI

Journal homepage: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>



THE EFFECT OF COMPETENCE, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE

Tiara Kusuma Wardiyanti¹,
Gideon Setyo Budiwitjacksono^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: tiarakusuma321@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponden Author Email: Gideon.ak@upnjatim.ac.id

Diterima : 25 Agustus 2021

Direvisi : 26 September 2021

Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

Abstract

This research takes relevant issues regarding competence, transparency, accountability community participation, and village government performance. This study aims to examine the effect of Competence, Transparency, Accountability, Participation on the Performance of the Panglungan Village Government, Wonosalam District, Jombang Regency. The method used is a quantitative method. The sampling technique used in this research is purposive sampling with certain criteria. This study uses primary data by collecting data using the questionnaire method by distributing questionnaires, then the Village Apparatus and the Panglungan Village Community fill out the questionnaire. The analysis technique in this study uses Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 7.0 software. The Structural Equation Model (SEM) analysis method consists of two sub models, namely the measurement model or often called the outer model and the structural model or often called the inner model. Based on the test results, it can be concluded that competence has a positive effect on the performance of the Panglungan Village government. Transparency has a positive effect on the performance of the Panglungan Village government. Accountability does not have a positive effect on the performance of the Panglungan Village government. Participation has a positive effect on the performance of the Panglungan Village government.

Keywords: Competence, Transparency, Accountability, Participation, Performance

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan Pemerintahan Pusat, tata kelola Pemerintahan Daerah, maupun tata kelola Pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dikatakan baik apabila mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, jujur, dan tertib. Otonomi daerah telah diberlakukan bertahun-tahun lamanya. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan desentralisasi fiskal.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa haruslah memiliki kecakapan, keterampilan, dan kemampuan atau yang pada umumnya disebut dengan kompetensi. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu pada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Widyatama et al., (2017) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menanganai suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa sesuai dengan hasil musyawarah. Wujud dari akuntabilitas data dilihat dari kinerja atau pencapaian hasil dari pelaksanaan program. Menurut Sukmawati & Nurfitriani (2019) akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab pada keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam pelaksanaan dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menjelaskan bahwa setiap Badan public mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi public yang berkaitan kepada masyarakat luas. Dengan memberi penjelasan, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak memberikan umpan balik dalam bentuk kritik maupun penghargaan.

Untuk memenuhi syarat keterbukaan informasi bagi *public*, pemerintah desa juga harus menerapkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan terutama yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah, selain itu transparansi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pengguna informasi lain yang membutuhkan (Umar, 2018). Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam menentukan baiknya pengelolaan terhadap dana desa, karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dan menentukan kebijakan keuangan bagi desa akan membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Menurut Firdaus (2019) dalam mewujudkan *good governance* masyarakat sipil adalah bagian yang cukup penting terutama didalam partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat di dalam pembangunan baik yang berbentuk pernyataan maupun yang berbentuk kegiatan dengan cara memberi masukan pikiran, tenaga, modal, keahlian, materi dan waktu, serta ikut merasakan manfaat dan menikmati hasil pembangunan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik plening suatu organisasi. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat desa. Kinerja pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik itu kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Nurhazizal et al., 2019). Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dipilih sebagai objek penelitian. Desa Panglungan merupakan desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Berikut merupakan data Realisasi APBDes Desa Panglungan tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBDes Desa Panglungan

Keterangan	2019	2020
Pendapatan	1.737.677.911	1.646.301.095
Pendapatan Asli Desa (PAD)	10.509.000	4.550.000
Dana Desa (DD)	967.551.000	997.214.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	52.679.023	53.546.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	440.623.000	440.623.000
Bantuan Keuangan	245.750.000	122.700.000
Pendapatan Lain-Lain	20.092.666	27.668.095
Belanja	1.515.457.200	1.770.682.677

Sumber : Realisasi APBDes Desa Panglungan 2019-2020

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Panglungan tahun 2019 adalah sebesar 10.509.000. PADes Desa Panglungan Tahun 2020 sebesar 4.550.000, Sedangkan untuk Dana Desa (DD) Desa Panglungan tahun 2019 adalah sebesar 967.551.000. Dana desa (DD) Desa Panglungan Tahun 2020 sebesar 997.214.000. Jika dilihat dari realisasi APBDes tersebut, terlihat ketergantungan dana oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, ditunjukkan dengan masih besarnya dana perimbangan atau dana desa dibanding dengan pendapatan asli desa. Rendahnya kemampuan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa ditunjukkan oleh relatif kecilnya pendapatan asli desa dibanding pendapatan transfer. Karena PADes kecil, maka ada kecenderungan bahwa masih kurangnya kemampuan dan usaha desa untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya kinerja pemerintah desa.

Berkaitan dengan pengaruh kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhazizal et al. (2019) berkesimpulan bahwa Kompetensi SDM dan good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan good governance memediasi Kompetensi SDM dan kinerja pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2017) memiliki kesimpulan bahwa tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa berkontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Ngawi. Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tidak berkontribusi terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Ngawi. Wahyudi (2017) juga melakukan penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa.

Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan (1) Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang? (2) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang? (3) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang? (4) Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, *steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Sehingga arti penting *stewardsihp* adalah bagaimana manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan bersama. Pemimpin yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi akan mampu memuaskan kebutuhan dari organisasi tersebut, sebab sebagian besar pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan pelayanan yang diraih organisasi. Sehingga pemimpin akan termotivasi dalam memaksimalkan kinerjanya (Wahyudi et al., 2019).

Implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi perangkat desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka dalam hal ini perangkat desa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam meningkatkan kompetensi perangkat desa, meningkatkan transparansi informasi, meningkatkan akuntabilitas publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja pemerintah desa.

Kompetensi

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Menurut Ainsworth, Smith dan Millership (2007:73) kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menanggapi suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa secara langsung akan mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kompetensi ini akan berdampak pada kemampuan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka & Muhsin (2018) bahwa Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja perangkat desa.

H₁: Bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan kinerja pemerintahan desa yang lebih baik dan berbagai indikator lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Putri et al. (2018) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa.

H₂: Bahwa Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila setiap perencanaan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut yang salah satunya adalah pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2017) bahwa tingkat akuntabilitas berkontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah desa bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah desa dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

H₃: Bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi/*participation* adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dapat dikategorikan dengan kalimat “turut ambil bagian” berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi masyarakat (Ihyaul, 2004:31).

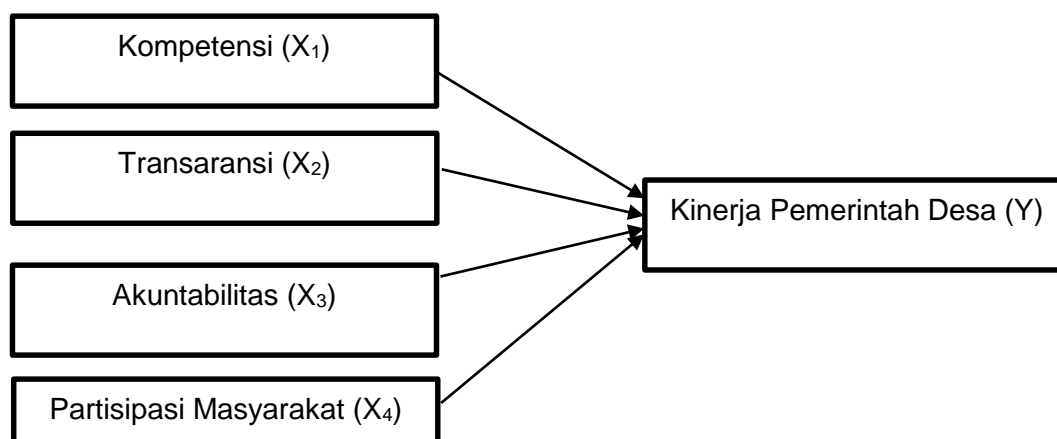
Partisipasi masyarakat pada dasarnya berperan penting didalam menciptakan keadaan yang lebih adil, partisipatif, dan akuntabel juga merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tatanan desa yang demokratis dan berjalan sesuai keinginan serta mampu meningkatkan potensi alam masyarakat desa. Dengan adanya tata kelola desa yang dinamis antara pemerintah desa dan masyarakat, desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara berkala untuk peningkatan hidup masyarakat desa. Hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa.

H₄: Bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Halim, 2007). Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya, sedangkan Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa dalam penelitian ini sama artinya dengan suatu organisasi. Kemudian, pengertian organisasi secara umum dapat diartikan sebagai bentuk formal sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pengertian dari Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir Teoritis

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian yang akan digunakan adalah Kinerja Pemerintah Desa, Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat.

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.172 orang. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* dengan kriteria Masyarakat Desa Panglungan, Berusia 21-65 tahun, Pendidikan minimal SD/Sederajat, dan Paham mengenai Kinerja Pemerintahan Desa. Dalam menentukan sampel dapat menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2018:137):

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan, N = Jumlah Populasi, e = Tingkat kesalahan sampel atau *sampling error* (10%)

$$n = \frac{2172}{1+2172(0,1)^2} = \frac{2172}{1+21,72} = \frac{2172}{22,72} = 95,598 = 96 \text{ sampel (dibulatkan)}$$

Berdasarkan dari perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 Responden dengan rincian 13 orang perangkat desa dan 83 orang masyarakat desa Panglungan yang memenuhi kriteria sebagai sampel.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Data dikumpulkan dengan metode angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2018:262) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini disebarikan oleh peneliti, kemudian Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Panglungan mengisi kuesioner.

Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model* (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

Uji Hipotesis

Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah:

H0: $\lambda_i = 0$ = Indikator yang digunakan dapat memprediksi variabel laten.

H0: $\lambda_i \neq 0$ = Indikator yang digunakan tidak dapat memprediksi variabel laten

Hipotesis statistik untuk *inner model*:

a. Hipotesis 1

H0: $\lambda_i = 0$ = Terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

H0: $\lambda_i \neq 0$ = Tidak terdapat pengaruh Kompetensi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

b. Hipotesis 2

H0: $\lambda_i = 0$ = Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

H0: $\lambda_i \neq 0$ = Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

c. Hipotesis 3

H0: $\lambda_i = 0$ = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

H0: $\lambda_i \neq 0$ = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

d. Hipotesis 4

H0: $\lambda_i = 0$ = Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

H0: $\lambda_i \neq 0$ = Tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Gambaran Umum Keadaan Responden

Peneliti telah menyebarkan kuesioner kepada Perangkat Desa dan Masyarakat di Desa Panglungan selama 7 hari yaitu pada tanggal 7 s/d 13 Juni 2021. Penyebaran kuesioner dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner, kemudian Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Panglungan mengisi kuesioner, hingga kuesioner tersebut diisi oleh 96 responden sesuai karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik dalam penelitian ini yaitu: Sebagian besar responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 59 responden. sebagian besar responden berusia sekitar 31 – 40 tahun dengan jumlah 40 orang. sebagian besar responden berpendidikan SMP/Sederajat dengan jumlah 33 orang.

Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEMberbasis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Warp PLS 7.0. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model (Abdillah, W., & Hartono, 2015), yaitu Model Pengukuran (*Outer Model*) dan Model Struktural (*Inner Model*).

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0,7, dan untuk nilai AVE (*Average Variance Extracted*) > 0,5 (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

Tabel 2. Hasil *Outer Loading* Tahap 1

Kompetensi (X1)	Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
X1.1	0,801			
X1.2	0,813			
X1.3	0,797			
X1.4	0,565			
X1.5	0,530			
X1.6	0,586			
X1.7	0,664			
X2.1	0,848			
X2.2	0,853			
X2.3	0,923			
X2.4	0,770			
X2.5	0,831			
X2.6	0,747			
X3.1		0,811		
X3.2		0,824		
X3.3		0,799		
X3.4		0,665		
X3.5		0,524		
X4.1			0,700	
X4.2			0,642	
X4.3			0,842	
X4.4			0,780	
X4.5			0,850	
Y.1				0,811
Y.2				0,865
Y.3				0,824
Y.4				0,578
Y.5				0,645

Sumber : Data diolah Penulis

Berdasarkan table *outer loading* tahap pertama terdapat 9 indikator yang berwarna merah mempunyai nilai *loading* dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan bahwa indikator tersebut harus dihapus karena tidak sesuai dalam memenuhi kriteria batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap kedua.

Tabel 3. Hasil *Outer Loading* Tahap 2

Kompetensi (X1)	Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
X1.1	0,858			
X1.2	0,917			
X1.3	0,873			
X2.1	0,848			
X2.2	0,853			
X2.3	0,923			
X2.4	0,770			
X2.5	0,831			
X2.6	0,747			
X3.1		0,825		
X3.2		0,854		
X3.3		0,876		
X4.1			0,658	
X4.3			0,859	
X4.4			0,817	
X4.5			0,890	
Y.1				0,883
Y.2				0,883
Y.3				0,867

Sumber : Data diolah Penulis

Berdasarkan *outer loading* tahap kedua terdapat 1 indikator yang berwarna merah mempunyai nilai *loading* dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan bahwa indikator tersebut harus dihapus karena tidak sesuai dalam memenuhi kriteria batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap ketiga.

Tabel 4. Hasil *Outer Loading* Tahap 3

Kompetensi (X1)	Transparansi (X2)	Akuntabilitas (X3)	Partisipasi Masyarakat (X4)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
X1.1	0,858			
X1.2	0,917			
X1.3	0,873			
X2.1	0,848			
X2.2	0,853			
X2.3	0,923			
X2.4	0,770			
X2.5	0,831			
X2.6	0,747			
X3.1		0,825		
X3.2		0,854		
X3.3		0,876		
X4.3			0,851	
X4.4			0,870	

X4.5	0,911
Y.1	0,883
Y.2	0,883
Y.3	0,867

Sumber : Data diolah Penulis

Berdasarkan hasil *outer loading* tahap ketiga pada table dapat dilihat bahwa semua indikator valid setelah dilakukan eatisasi sebanyak 3tahap. Indikator dapat dikatakan valid karena semua nilai *loading factor* berada diatas 0,70 sehingga konstruk untuk semua variabel tidak ada yang dieliminasi dari model.

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Tabel 5. Hasil Pegujian Validitas Diskriminan

Indikator	Loading		Nilai Loading kekonstruk lainnya					Keterangan
			X1	X2	X3	X4	Y	
X1.1	0,858	>		0,496	-0,125	-0,294	0,002	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X1.2	0,917	>		-0,115	-0,125	0,127	0,037	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X1.3	0,873	>		-0,366	0,254	0,156	-0,041	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.1	0,848	>	0,152		-0,056	-0,255	0,211	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.2	0,853	>	0,142		0,112	-0,287	-0,189	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.3	0,923	>	0,023		-0,072	-0,006	0,079	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.4	0,770	>	-0,036		-0,256	-0,018	-0,188	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.5	0,831	>	-0,076		0,233	0,077	0,065	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X2.6	0,747	>	-0,243		0,028	0,557	0,000	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X3.1	0,825	>	0,101	-0,080		-0,389	-0,168	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X3.2	0,854	>	-0,062	-0,330		0,045	0,234	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X3.3	0,876	>	-0,034	0,397		0,322	-0,069	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X4.3	0,851	>	-0,149	-0,447	0,557		0,194	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
X4.4	0,870	>	0,022	0,082	-0,023		-0,346	Memenuhi

								<i>Discriminant Validity</i>
X4.5	0,911	>	0,118	0,339	-0,498		0,149	Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
Y.1	0,883	>	0,071	0,234	-0,372	0,070		Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
Y.2	0,883	>	0,127	0,365	0,009	-0,582		Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>
Y.3	0,867	>	-0,201	-0,610	0,370	0,522		Memenuhi <i>Discriminant Validity</i>

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Variabel Kompetensi memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan X1.1, X1.2, X1.3 memiliki nilai loading 0,917 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu -0,115, -0,125, 0,127, dan 0,037. Dan ke 2 indikator variabel kompetensi juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel Transparansi yang memiliki 6 indikator yang di lambangkan dengan X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6. X2.3 memiliki nilai loading 0,923 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,023, -0,072, -0,006 dan 0,079. Dan ke 5 indikator variabel Transparansi juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel akuntabilitas yang memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan X3.1 sampai dengan X3.3. X3.3 memiliki nilai loading 0,876 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu -0,034, 0,397, 0,322 dan 0,149. Dan ke 2 indikator variabel akuntabilitas juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel partisipasi masyarakat yang memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan X4.3 sampai dengan X4.5. X4.5 memiliki nilai loading 0,911 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,118, 0,397, 0,339, -0,498 dan -0,069. Dan ke 2 indikator variabel partisipasi masyarakat juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain. Variabel kinerja pemerintah desa yang memiliki 3 indikator yang di lambangkan dengan Y.1, Y.2, Y.3. Y.1 memiliki nilai loading 0,883 yang nilai loadingnya ke konstruk lain yaitu 0,071, 0,234, -0,372, dan 0,070. Dan ke 2 indikator variabel kinerja pemerintah desa juga memiliki nilai loading yang lebih besar dari nilai loading ke konstruk lain.

Composite Reliability

Tabel 6. Composite Reliability Coefficient dan Cronbach's Alpha Coefficient

	X1	X2	X3	X4	Y	Kriteria	Keterangan
<i>Composite Reliability</i>	0,914	0,930	0,888	0,909	0,910	> 0,7	<i>Reliable</i>
<i>Cronbach's Alpha</i>	0,858	0,909	0,811	0,850	0,851	> 0,6	<i>Reliable</i>

Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *Composite Reliability* untuk setiap variabel X1, X2, X3, X4 dan Y adalah sebesar 0,914, 0,930, 0,888, 0,909, dan 0,910. Sedangkan untuk *Cronbach's Alpha* setiap variabel dinilai dari X1, X2, X3, X4 dan Y adalah sebesar 0,858, 0,909, 0,811, 0,850 dan 0,851. Berdasarkan hasil dari *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi syarat kriteria uji reliabilitas.

Model Struktural (Inner Model)

Pada uji kecocokan model terdapat 3 indeks pengujian meliputi, *average path coefficient (APC)*, *average R-Squared (ARS)* dan *average variance inflation (AVIF)* dengan kriteria APC dan ARS

diterima dengan syarat $p\text{-value} < 0,05$ dan $AVIF < 5$ (Abdillah, W., & Hartono, 2015). Berikut ini adalah hasil *output* model fit dan *quality indices* yang disajikan dalam tabel yaitu:

Tabel 7. Hasil *Output* Model Fit

	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
APC	0,231	0,004	$P < 0,05$	Diterima
ARS	0,646	0,001	$P < 0,05$	Diterima
AVIF	4,501 <i>Good if < 5</i>		$AVIF < 5$	Diterima

Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,231 dengan $p\text{-value} < 0,001$, sedangkan ARS memiliki indeks sebesar 0,646 dengan $p\text{-value} < 0,001$, dilihat dari kriteria APC dan ARS sudah memenuhi kriteria karena memiliki $p < 0,001$. Dan untuk nilai AVIF yang harusnya < 5 sudah terpenuhi karena berdasarkan data tersebut AVIF nilainya 4,501.

Tabel 8. R-Square

	X1	X2	X3	X4	Y
R-Squared					0,979

Sumber: Output WarpPLS

Evaluasi model struktural pada R 2, Nilai R-square variabel Kinerja Pemerintah Desa (Y) sebesar 0,979. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Kompetensi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 97,9%.

Uji Hipotesis

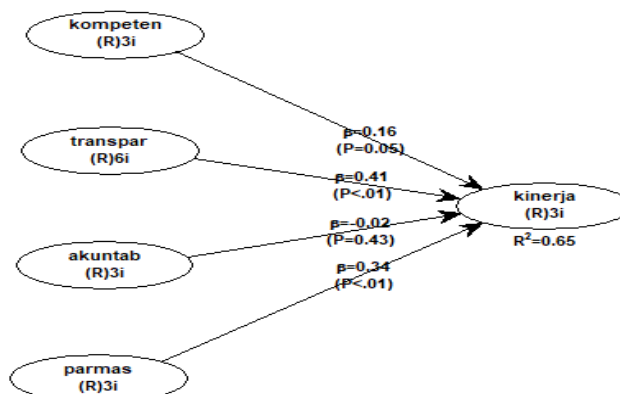
Berikut ini adalah tabel hasil penelitian dari *effect size* yang telah diperoleh dari pengolahan data :

Tabel 9. Path Coefficient, p – values, dan Effect sizes for path

Kriteria	Variabel	X1	X2	X3	X4	Y
Path Coefficients	X1	-	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-	-
	Y	0,159	0,409	-0,019	0,338	-
P-values	X1	-	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-	-
	Y	0,054	$<0,001$	0,427	$<0,001$	-
Effect sizes for path	X1	-	-	-	-	-
	X2	-	-	-	-	-
	X3	-	-	-	-	-
	Y	0,077	0,320	0,014	0,264	-

Sumber: Output WarpPLS

Berikut ini merupakan gambar hasil penelitian dari effect size yang telah diperoleh dari pengolahan data :



Gambar 3. Hasil Penelitian
Sumber: Output WarpPLS

Persamaan Struktural:

$$Y = 0,159(X1) + 0,409(X2) + (-0,019)(X3) + 0,338(X4)$$

Keterangan :

Y : Kinerja Pemerintah Desa

X1 : Kompetensi

X2 : Transparansi

X3 : Akuntabilitas

X4 : Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil diatas, maka uraian pengujian hipotesis sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis (H1: Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar 0,05 yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana $p\text{-value} \leq 0,05$ diterima. Dan dari nilai *path Coefficients* sebesar 0,16 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap kinerja pemerintah desa, maka kompetensi meningkat sebesar 0,16 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima karena variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa Panglungan.

Pengujian Hipotesis (H2 : transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar $< 0,01$ yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana $p\text{-value} \leq 0,05$ diterima. Dan dari nilai *Path Coefficients* sebesar 0,41 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap kinerja pemerintah desa, maka transparansi meningkat sebesar 0,41 dan begitu pulasebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima karena variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.

Pengujian Hipotesis (H3 : akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan)

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar 0,43 yaitu tidak memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana $p\text{-value} \geq 0,05$ ditolak. Dan dari nilai *Path Coefficients* sebesar -0,02 menunjukkan arah hubungannya negatif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan terhadap kinerja pemerintah desa, maka akuntabilitas menurun sebesar -0,02 dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.

Pengujian Hipotesis (H4 : partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Panglungan)

Hipotesis keempat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berdasarkan nilai *p-value* sebesar $< 0,01$ yaitu telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yang mana $p\text{-value} \leq 0,05$ diterima. Dan dari nilai *Path Coefficients* sebesar 0,34 menunjukkan arah hubungannya positif, angka tersebut juga menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap kinerja pemerintah desa, maka partisipasi masyarakat meningkat sebesar 0,41 dan begitu pulasebaliknya. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima karena variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Diterimanya hipotesis pertama memberikan makna bahwa semakin meningkat kompetensi dalam pemerintah desa akan memberikan dampak positif terhadap proses kerjanya, hal ini akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka & Muhsin (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja perangkat desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Nurhazizal et al. (2019) juga menyatakan bahwa Kompetensi SDM dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa semakin meningkatnya transparansi akan mendorong keterbukaan pemerintahan desa terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) juga menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Tidak diterimanya hipotesis ketiga memberikan arti bahwa pertanggungjawaban dalam menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil, tidak memberikan pengaruh pada kinerja pemerintah desa secara efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian *inner model* dan *outer model*, diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Diterimanya hipotesis keempat memberikan makna bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana et al. (2019) juga menyatakan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Artinya semakin meningkat kompetensi dalam pemerintah desa akan memberikan dampak positif terhadap proses kerjanya, hal ini akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berarti bahwa semakin meningkatnya transparansi akan mendorong keterbukaan pemerintahan desa terhadap masyarakat. Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berarti bahwa pertanggungjawaban dalam menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil, tidak memberikan pengaruh pada kinerja pemerintah desa secara efektif, efisien dan ekonomis. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Panglungan. Berarti bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan desa.

Saran

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1. **Saran Praktis:** diharapkan dapat bermanfaat Bagi Pemerintah desa sebagai perwakilan dari masyarakat sebaiknya terus meningkatkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat mengenai kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dengan baik kepada

masyarakat dan perangkat desa agar kinerja pemerintah desa dapat lebih meningkat demi kepentingan masyarakat.

- 2. Saran Teoritis:** disarankan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya dengan menambahkan atau menggunakan variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat atau dapat menggunakan variabel – variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kinerja pemerintah Desa.

Keterbatasan

Peneliti telah melakukan penelitian ini secara optimal untuk mendukung tujuan penelitian, namun demikian peneliti merasa dalam hasil penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan penelitian yaitu, dalam pengumpulan data, peneliti kesulitan mencari responden yang memahami maksud kuesioner sehinggamemakan waktu yang cukup lama. Jawaban yang diberikan responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Adanya perbedaan persepsi anatar masing – masing responden dalam memahami konteks pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner. Kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak jujur.

REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (D. Prabant). Andi.
- Ainsworth, M., Millership, A., Smith, N., Supriyanto, T., & Pare, D. (2007). *Managing performance managing people : panduan praktis untuk memahami dan meningkatkan performa tim*. Bhuana Ilmu Populer.
- Eka, D. S., & Muhsin. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memediasi Pengaruh Variabel Keteladanan Pemimpin, Kompetensi Perangkat Desa, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 18–23.
- Firdaus, A. dan S. dan S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Ihyaul, U. (2004). *Akuntansi sektor publik: sebuah pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Istiqomah, N. N. (2017). *Analisis Akuntabilitas, Tarnsparansi, Partisipasi Masyarakat dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)*. file:///C:/Users/Acer/Downloads/4409-8585-1-SM.pdf
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi 1). Andi Offset.
- Ningsih, F. Y., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Penganggaran Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1977/1983>
- Nurhazizal, M., Basri, Y. M., & Nasir, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(9), 80–92.
- Oktaviana, A. W., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, PartisipasiPenyusunan Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(8), 352 – 361.
- Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14, 69–75.
- Sabarno, H. (2010). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.)). CV. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136–148. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>
- Wahyudi, A. (2017). Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(1), 65–85. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Wahyudi, A., Ngumar, S., & Suryono, B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.815>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>